

Dewan Pendidikan dan Peradi Cibinong Tandatangani MoU

CIBINONG (IM)- Mencegah terjadi perkara hukum di lingkungan sekolah, Dewan Pendidikan dan Peradi Cibinong, Kabupaten Bogor menandatangani MoU atau kerjasama dengan disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah.

“Dengan adanya MoU ini, maka Peradi Cibinong, Kabupaten Bogor bisa memberikan bantuan, sosialisasi dan bantuan hukum, baik kepada pihak sekolah, kepala sekolah (Kepsek) maupun guru,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Takiyudin Basari kepada wartawan, Senin (31/7).

Takiyudin Basari menuturkan bahwa bantuan hukum yang diberikan Peradi Cibinong, Kabupaten

Bogor secara gratis, hingga jika ada oknum LSM, Ormas dan media yang bukan kewenangannya meminta data maka akan dihadapi oleh teman-teman pengacara tersebut.

“Banyak oknum yang meminta data atau lainnya, lalu menyatakan tidak sesuai dimana karena tidak mau repot, para Kepsek pun memberikan uang. Jadi bakal terjadi Ujung-Ujungnya Duit (UUD),” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa kini jadi Kepsek maupun guru secara psikologis berat, contoh tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga pihak orang tua murid yang tidak terima anaknya diberikan sanksi hukuman.

“PPDB diributkan, padahal sesuai aturan. Lalu ada

guru yang dipidana karena bertindak tegas terhadap anak didiknya. Kami tak ingin ada Kepsek dan Guru yang dipidana, karena alasan sepele yang dibesar-besarkan. Dewan Pendidikan menginginkan masalah di lingkungan sekolah diselesaikan secara kekeluargaan atau setidaknya diresortative justice,” tambahnya.

Ketua Peradi Cibinong Kabupaten Bogor, Oteu Herdiansyah menjelaskan bahwa jajarannya siap memberikan pendampingan, sosialisasi atau penyuluhan dan bantuan hukum kepada pihak sekolah yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Kami lebih kepada upaya pencegahan perkara hukum, tetapi apabila terjadi perkara hukum, maka kami siap mendampingi dan memberikan bantuan hukum,” jelas Oteu Herdiansyah.

Oteu Herdiansyah dalam kesempatan ini pun mengimbau agar pihak sekolah, Kepsek dan Guru tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan atau tata kelola anggaran pendidikan.

“Jangan juga main-main dengan anggaran pendidikan, karena jika terjadi penyelewengan, maka hukumannya pun tidak main-main. Oleh karena itu, kedepan kami memprioritaskan pencegahan pelanggaran hukum di lingkup sekolah,” tukasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



KPU dan PPK serta Camat se-Kabupaten Bogor, matangkan Persiapan Pemilu 2024 dengan memperkuat sinergi.

KPU dan PPK Serta Camat se-Kab. Bogor Matangkan Persiapan Pemilu 2024

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, penguatan sinergitas antara KPU, PPK, Bawaslu dengan para Camat sangat penting dalam menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang.

CIBINONG (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan memperkuat sinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Camat se-Kabupaten Bogor, melalui kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Ruang Serbaguna I

Setda, Senin (31/7). Itu dilakukan guna mendukung sukses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, penguatan sinergitas antara KPU, PPK, Bawaslu dengan para Camat sangat penting dalam menyelesaikan peny-

elenggaraan Pemilu tahun 2024 mendatang atau agenda rutin lima tahun sekali. Sehingga perlu sinergitas dan penyiapan persepsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Daerah lain tidak ada yang seperti ini. Ini bukti kuatnya sinergi kami,” terangnya.

Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan, dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor dengan jumlah DPT sebesar 3.889.441 dan 15.228 TPS ini adalah jumlah TPS terbesar se-Indonesia untuk tingkatan Kabupaten dan Kota bahkan kalau kita range untuk provinsi kita urutan ke 14. Sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat dari semua

pihak untuk menyelesaikan Pemilu 2024 nanti.

“Dengan pertemuan ini, fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sangat luar biasa buat kami. Teman-teman PPK juga sudah merasakan sejak kami lantik di bulan Januari tahun ini sampai sekarang, luar biasa pemerintah daerah memperhatikan kami,” jelas Ummi.

Ia juga menyatakan terimakasih kepada Pemkab Bogor yang telah membangun gudang logistik seluas 1.600 meter. Bahkan kami diapresiasi langsung oleh KPU RI bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan KPU juga teman-teman di kecamatan.

“Alhamdulillah tadi pak Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan dan pak Wildan juga menyampaikan bagaimana anggaran untuk sewa gudang yang ada di kecamatan dan fasilitas untuk teman-teman di kecamatan. Dengan jumlah DPT sebanyak 3.889.441 pemilih, artinya di Pemilu 2024 nanti kita harus memanager kurang lebih 20 juta lembar surat suara, kemudian kurang lebih 80.000 kotak suara. Ini menjadi berat bagi kami kalau kami tidak sinergikan, tidak dibantu oleh semua stakeholder yang terkait dengan Pemilu 2024. Alhamdulillah Pemkab Bogor senantiasa sinergi dan membantu kami,” imbuhnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

GURU MADRASAH TOLAK SEKOLAH SEHARI PENUH

Massa dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (31/7). Mereka menolak wacana sekolah sehari penuh atau full day school yang diberlakukan pada lembaga pendidikan negeri dan mendesak kepada pemerintah daerah untuk menginstruksikan SD Negeri untuk mengefektifkan jam pembelajaran serta agar siswa-siswi Diniyah Takmiliah datang ke Madrasah tepat waktu.

Bima Arya Ajak Generasi Muda Produksi Konten Narasi Positif

BOGOR (IM)- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda memproduksi narasi positif untuk menangkal hoaks menjelang Pemilu 2024.

Bima Arya mengatakan, generasi muda perlu mengedepankan ide atau gagasan yang substantif dan kreatif untuk membuat narasi positif sebagai pengawal Pemilu 2024 sejak sekarang.

“Pemilu gagasan yang perlu dikedepankan, bukan hanya sekadar mengklarifikasi isu, atau fitnah yang menyebar di masyarakat. Dalam kampanye pemilu maka gagasan ini yang perlu dikampanyekan dan ditularkan oleh anak-anak muda,” kata Bima Arya Sugiarto, kemarin.

Menurut Bima, sudah saatnya mengangkat narasi-narasi positif dalam kontestasi politik 2024 dengan mengangkat gagasan-gagasan mengenai kemajuan bangsa ke depan.

Bima menerangkan, konsep menangkal hoaks dengan produksi gagasan dan ide kreatif dilakukan melalui kajian pembahasan dan analisa mengenai substansi dan trik (gimmick) yang hasilnya dievaluasi untuk kemudian memunculkan hal positif baru.

Peran generasi muda harus jadi penggerak isu, menyebar isu, membuat pemilu kreatif, mengajak anak-anak muda lain untuk ada di depan, meluaskan

barisan menjadikan area pemilu yang mencerahkan dan menyenangkan untuk semua.

Gagasan mengenai kreativitas Pemilu 2024 pernah disampaikan juga oleh Bima Arya pada acara Loklatih di Bumi Gumati, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (26/7) lalu.

Loklatih yang diadakan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina bekerjasama dengan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Forum kerukunan umat beragama ini mengangkat tema membangun narasi positif untuk menangkal hoaks dan hasutan di Kota Bogor.

Bima menyampaikan, realitas dan dinamika dalam kehidupan demokrasi ada tiga jenis orang, yakni orang kecil yang berbicara tentang orang lain, orang biasa yang berbicara tentang peristiwa, dan orang besar yang bicara mengenai ide dan gagasan.

Ide dan gagasan bisa disampaikan dari orang ke orang melalui jaringan komunitas, organisasi dan juga media sosial.

Namun setiap gagasan atau ide yang ditampilkan melalui wadah (platform) media sosial ataupun melalui tatap muka perlu dibuat semenarik mungkin dengan menggabungkan antara substansi dan trik untuk lebih banyak menarik minat. ● **pra**

Perwal Pencegahan Penyimpangan Seksual di Bogor Masih Diproses

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, masih memproses aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Aturan turunan itu bentuknya disebut berupa peraturan wali kota (perwal).

Menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, draf perwal tersebut sudah ada. “Masih digodok. Sudah ada

drafnya, saya masih pelajari,” kata Bima Arya, Senin (31/7).

Forum Masyarakat Peduli Bogor sebelumnya sempat mendesak wali kota untuk segera menerbitkan perwal menindaklanjuti Perda P4S. Dalam perda itu disebutkan, peraturan pelaksanaan perda harus ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. Namun, hingga 2023, perwal itu tak kunjung diterbitkan.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah sebelumnya

menjelaskan, pimpinan Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Kota Bogor, serta memberikan sejumlah masukan untuk perwal.

Menurut Syarifah, isi perwal sebagai peraturan pelaksanaan Perda P4S perlu disinkronkan dengan Perda HAM, yang baru disahkan pada April 2023. “Pada 2023 DPRD Kota Bogor juga mengeluarkan Perda HAM. Ini pun kita sinkronkan

karena ini saling terkait antara Perda HAM dan P4S,” kata Syarifah, Jumat (14/7).

Syarifah mengatakan, sinkronisasi kedua perda tersebut dilakukan agar nantinya perwal tidak diubah-ubah lagi. Berdasarkan laporan dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, kata dia, proses sinkronisasi sudah mencapai sekitar 90 persen. Namun, Pemkot Bogor tengah meminta fasilitasi di Provinsi Jawa Barat, yang kembali membutuhkan waktu. Syarifah

mengajak masyarakat mengawal proses pencirbitan perwal agar Perda P4S bisa segera diterapkan di Kota Bogor.

Diharapkan, kata dia, ketentuan perda sudah dapat diterapkan menjelang akhir masa kepemimpinan Bima Arya sebagai wali kota. “Yang terpenting di akhir masa kepemimpinan beliau sudah ada. Ini tentang bagaimana kita menyelamatkan anak-anak dan agama kita,” kata Syarifah. ● **yan**

DPRD Jawa Barat Setujui dan Tetapkan 6 Ranperda Masuk di Perubahan Propemperda Jabar 2023

BANDUNG (IM)- DPRD Jawa Barat menyetujui dan sekaligus menetapkan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk di perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jabar Tahun 2023.

Persetujuan dan penetapan 6 Ranperda masuk di perubahan Propemperda Provinsi Jabar Tahun 2023 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, Jumat (28/7).

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ruhiyat menuturkan, 6 Ranperda yang telah disetujui atau ditetapkan tersebut merupakan usulan dari Gubernur atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

Sebelum persetujuan dan penetapan, DPRD Jawa Barat telah menerima surat dari Gubernur Jabar dengan nomor 4143/HK.02.01/HUKHAM tanggal 30 Mei 2023 tentang Permohonan Usulan Tambahan Ranperda untuk Propemperda 2023.

Kemudian, berdasarkan rapat Badan Musyawarah pada 6 Juli 2023 disepakati membahas surat tersebut dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dari 17 sampai 28 Juli 2023.

“Alhamdulillah, Bapemperda telah menyelesaikan pembahasannya, dan telah melaporkannya dalam rapat paripurna yang dibacakan oleh Anggota Bapemperda Dessy Susilawati,” tutur Achmad Ruhiyat, di Ban-



Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum (kiri) dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ruhiyat (tengah) serta Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Oleh Soleh (kanan), Bandung, Jumat (28/7).



dung, Jumat (27/7).

Sementara itu, Anggota Bapemperda, Dessy Susilawati menjelaskan terkait pelaksanaan pembahasan 6 Ranperda yang diusulkan gubernur.

Bapemperda telah melaksanakan kegiatan pembahasan 6 Ranperda tersebut mulai 17 sampai 28 Juli 2023 ke berbagai pihak terkait, dan diakhiri dengan rapat pleno Bapemperda.

Rapat pleno Bapemperda

menghasilkan beberapa hal diantaranya; empat Ranperda disetujui untuk ditetapkan dalam usul tambahan Ranperda pada Propemperda 2023, dan dilanjutkan pada pembahasan tahap II berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Empat (4) Ranperda

yang dimaksud, Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat,” jelas Dessy Susilawati.

“Ranperda tentang Penyerntaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perusahaan Perseoran Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat,” lanjut Dessy Susilawati.

Adapun 6 Ranperda Perubahan Propemperda Provinsi Jabar 2023 tersebut:

1. Ranperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
3. Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Ranperda tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseoran Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat
5. Ranperda tentang Penyerntaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Kepada Perusahaan Perseoran Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat
6. Ranperda tentang Penggabungan Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karya Utama Jabar, Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar, dan Perseoran Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Galuh Mandiri Jabar. ● **Iys**